

PERANAN AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

Nabila Nur Andini¹, Maureen Imbruglia Marcus², Dela Sukma Pangestu³,
Adrian Fharas Yuandra Putra⁴, Aryanto Nur⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63230688@bsi.ac.id¹, 63230854@bsi.ac.id², 63230904@bsi.ac.id³, 63230721@bsi.ac.id⁴, aryantonur@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received 21/10/2025

Revised 21/10/2025

Accepted 22/10/2025

Abstract

This research aims to examine the contribution of management accounting in the public sector as a supporting mechanism for decision making aligned with the principles of good governance. In public sector management practices, management accounting functions not merely as a financial recording and reporting system but also as a strategic information framework that assists institutional leaders in planning, controlling, and evaluating organizational performance. The study adopts a literature review method by analyzing various academic sources such as journals, books, and regulations related to implementation of management accounting in government institutions. The findings reveal that the effective application of management accounting can strengthen transparency, accountability, efficiency, and the overall quality of decision making within the public sector. Hence, management accounting plays a vital role in realizing good governance through the provision of relevant, reliable, and accountable information.

Keywords: Management Accounting, Public Sector, Decision-Making, Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peranan akuntansi manajemen di sektor publik dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam praktik manajemen organisasi publik, akuntansi manajemen tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan juga berperan sebagai sistem informasi strategis yang membantu pimpinan instansi dalam merencanakan serta mengawasi kinerja lembaga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan meninjau berbagai sumber akademis seperti jurnal, buku, dan regulasi yang berhubungan dengan penerapan akuntansi manajemen di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen yang optimal dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan di sektor publik. Karenanya, akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Akuntansi Manajemen, Sektor Publik, Pengambilan Keputusan, *Good Governance*.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di masa reformasi birokrasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan berkinerja baik telah menjadi masalah utama. Di berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, fokus utama dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Baik manajemen bukan hanya manajemen yang baik; itu juga melibatkan prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, efisiensi, dan efektifitas. Tingkat penerapan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, sangat penting untuk keberhasilan pemerintahan.

Menurut (Inka Putri et al., 2025) Akuntansi Sektor Publik telah berkembang dari alat administratif menjadi sistem penting yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan yang ideal. Lebih khusus lagi, akuntansi manajemen sektor publik memainkan peran yang

sangat penting. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tidak seperti sektor swasta yang berfokus pada keuntungan. Oleh karena itu, akuntansi manajemen harus diubah untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Akuntansi Manajemen menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, yang membantu manajer publik dalam pembuatan rencana strategis, mengendalikan keuangan, mengevaluasi kinerja, dan mengambil keputusan yang tepat (Muna & Lautania, 2022).

Peran Akuntansi Manajemen dalam mengambil keputusan menjadi semakin penting, karena tuntutan untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan (*data driven decision making*) dan meningkatkan efisiensi biaya. Informasi dari Akuntansi Manajemen yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi, serta transparansi organisasi (Sianipar N et al., 2025). Dalam hal transparansi, akuntansi memastikan informasi yang diberikan kepada publik akurat dan jujur. Sementara dalam hal akuntabilitas, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Sebab itu, kualitas keputusan manajer publik sangat bergantung pada tingkat kejelasan dan keandalan informasi yang diperoleh dari sistem akuntansi manajemen yang digunakan.

Namun demikian, ada perkembangan yang positif dalam hal kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan tuntutan yang semakin meningkat untuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik tidak hanya mempengaruhi sektor pemerintahan, tetapi juga mendorong praktik kepemimpinan yang baik di sektor non-pemerintahan, yang memiliki fondasi tata kelola yang solid dan komitmen terhadap prinsip integritas.

Penelitian oleh Sigalingging et al. (2024) Menekankan peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi manajemen yang baik, perusahaan dapat memperbaiki efektivitas dalam perencanaan anggaran, pengawasan operasional, serta pengambilan keputusan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan penggunaan sumber daya secara efisien dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sementara itu, Qisthy et al. (2025) Meneliti peran akuntansi manajemen di sektor publik dalam mendukung akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen yang transparan dan berdasarkan data memberikan kontribusi besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan akuntabilitas publik dan sistem pelaporan kinerja yang dapat diukur.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Namun, penelitian sebelumnya cenderung menganggap tata kelola yang baik sebagai hasil akhir dari penerapan akuntansi manajemen, bukan sebagai arah atau tujuan utama dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Sebagai pengembangan, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan menempatkan tata kelola yang baik sebagai orientasi utama dan kerangka konseptual dalam proses pengambilan keputusan publik melalui akuntansi manajemen. Artinya, penelitian ini tidak hanya menilai seberapa besar akuntansi manajemen meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dapat diintegrasikan langsung dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan di lembaga sektor publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur akuntansi manajemen, yaitu menjadikan *good governance* bukan hanya sebagai hasil, tetapi sebagai arah strategis dalam desain sistem informasi manajemen dan proses pengambilan keputusan publik. Rumusan masalah difokuskan pada sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integritas prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabilitas, dan berintegritas.

Konsep Akuntansi Manajemen

Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah proses yang terstruktur dan teratur, mencakup kegiatan mencatat, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam hal ekonomi. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi digunakan oleh berbagai pihak,

baik yang ada di dalam perusahaan seperti manajemen, maupun pihak luar seperti investor, pemberi kredit, dan pemerintah, untuk mengevaluasi tingkat kinerja serta kondisi keuangan organisasi tersebut.

Manajemen adalah proses yang melibatkan beberapa kegiatan seperti perencanaan, mengorganisasi, memberi arahan, dan mengendalikan berbagai sumber daya, seperti manusia, uang, serta bahan, agar organisasi bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Yang paling penting dalam manajemen bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana cara mengelola proses kerja agar penggunaan sumber daya menjadi maksimal. Menurut George R. Terry, manajemen adalah rangkaian kegiatan khusus yang mencakup perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi, demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sementara itu, Koontz dan O'Donnell mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa manajemen berperan sebagai alat untuk mengatur, memberi arahan, dan mengendalikan kegiatan organisasi agar semua bagian bekerja sama dan sejalan untuk mencapai tujuan, sekaligus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Menurut Usman et al., (2022) akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menyediakan data finansial maupun non finansial bagi manajemen untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Lain halnya akuntansi finansial, akuntansi manajemen tidak terpaku oleh kualifikasi resmi, seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Baihaqqy, 2023a). Ruang lingkupnya mencakup analisis biaya, penyusunan anggaran, pengawasan kinerja, serta penentuan biaya relevan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk menyusun rencana, menilai efisiensi aktivitas, dan merumuskan strategi bisnis yang tepat. Selain itu, akuntansi manajemen juga menerapkan konsep-konsep seperti biaya relevan, biaya peluang, akuntansi pertanggungjawaban, dan pengendalian anggaran untuk membantu manajer memahami dampak ekonomi dari setiap kebijakan yang dipilih. Dengan demikian, akuntansi manajemen memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan organisasi dan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Proses akuntansi manajemen dalam sebuah organisasi bertujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer agar dapat melakukan pengendalian, koordinasi, dan perencanaan. Pengendalian adalah cara yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan semua anggota organisasi bekerja dengan baik dan tepat waktu agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, data akuntansi berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, memberikan motivasi, memantau, serta mengevaluasi kinerja. Koordinasi berupaya menggabungkan dan mengarahkan berbagai kegiatan di tiap bagian organisasi agar dapat berjalan secara selaras demi mencapai tujuan bersama. Sementara itu, perencanaan adalah proses mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan, baik di tingkat bagian tertentu maupun seluruh organisasi. Dengan demikian, akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam membantu manajer menjalankan tugas-tugas manajerial secara terarah dan terukur.

Akuntansi Manajemen Di Sektor Publik

Sektor publik merupakan komponen perekonomian yang mencakup lembaga atau organisasi yang dimiliki serta dijalankan oleh pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun regional. Tujuan utamanya adalah penyediaan layanan kepada masyarakat, bukan pencarian profit. Aktivitas di dalamnya melibatkan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi umum, dan administrasi pemerintahan. Berbeda dari sektor swasta yang menitikberatkan pada keuntungan, sektor publik menekankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dana untuk sektor ini bersumber dari pajak, retribusi, hibah, atau pinjaman pemerintah, yang kemudian dialokasikan guna mendukung program-program pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan, sektor publik meliputi semua kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik luas serta penyediaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat. Pendanaannya diperoleh dari pajak atau pendapatan negara, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya mencakup bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi. Karena cakupannya yang luas, beberapa aktivitas sektor publik dikelola melalui mekanisme pasar, namun pemerintah tetap berperan penting dengan melakukan pengawasan melalui regulasi. Selain itu, beberapa bidang dalam sektor ini dikelola dengan bantuan dana dari sumbangan masyarakat atau lembaga amal.

Akuntansi sektor publik secara pokok bertujuan untuk mencegah praktik kejahatan politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial serta

kesetaraan. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disahkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi tentang aktivitas pemerintah, termasuk data keuangan. Undang-undang tersebut bertujuan menghindari pengelolaan keuangan publik oleh lembaga publik, pejabat, dan organisasi terkait yang merugikan masyarakat.

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (SIAM)

Menurut Yosep & Indriasih (2020) sistem informasi akuntansi manajemen dirancang sebagai sumber informasi yang mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini juga diharapkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian di dalam organisasi. Pengendalian tersebut dapat dicapai jika karyawan menunjukkan komitmen yang kuat dan loyalitas terhadap organisasi. Dengan demikian, keyakinan tentang apa yang dianggap benar akan membentuk dasar perilaku karyawan, karena hal ini terkait dengan aspek moral.

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (SIAM) merupakan komponen dari sistem informasi organisasi yang bertugas mengumpulkan, memproses, serta menyajikan data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Berbeda dari sistem akuntansi keuangan yang fokus pada pelaporan eksternal, SIAM lebih menekankan kebutuhan informasi internal bagi manajemen guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. SIAM bertugas mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan menyampaikan informasi penting kepada manajer untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Aktivitas sistem pengendalian manajemen dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di dalam organisasi. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kinerja perusahaan serta efektivitas manajemennya, sekaligus menjadi acuan dalam proses perencanaan. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara atasan dan bawahan saat menjalankan berbagai tugas juga mencakup unsur pengendalian. Secara umum, proses pengendalian manajemen meliputi empat kegiatan utama, yaitu perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja (Supratinningrum & Lukas, 2021). Dengan berkembangnya teknologi, SIAM kini semakin terintegrasi dalam platform digital seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan Business Intelligence (BI), sehingga memungkinkan penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan real-time untuk membantu manajemen mencapai kinerja optimal.

Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik

Proses pengambilan keputusan berhubungan dengan ketidakpastian hasil yang akan terjadi dari keputusan yang dibuat. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, diperlukan informasi ahli yang mendalam mengenai kondisi yang telah terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Informasi tersebut diolah menjadi beberapa pilihan alternatif solusi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah yang akan diambil. Dengan cara ini diharapkan keputusan yang dibuat bisa memberikan manfaat atau keuntungan yang optimal. (Baihaqqy, 2023b).

Pengambilan keputusan di sektor publik merupakan mekanisme untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang diadopsi oleh lembaga pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Berbeda dari sektor swasta yang lebih berorientasi pada pencarian profit, sektor publik menitikberatkan pada tujuan sosial, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Proses ini mencakup tahapan krusial seperti identifikasi masalah, analisis alternatif, serta pemilihan solusi yang paling tepat dengan mempertimbangkan faktor hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Karena melibatkan berbagai pihak, pengambilan keputusan di sektor publik cenderung lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan yang mendalam.

Dalam proses tersebut, data yang akurat dan terpercaya diperlukan sebagai fondasi bagi keputusan yang efektif. Akuntansi manajemen di sektor publik memainkan peran krusial dengan menyediakan informasi keuangan dan operasional yang relevan, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini mendukung perancangan program, alokasi anggaran, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Dengan sistem informasi yang solid dan penerapan prinsip good governance, pengambilan keputusan di sektor publik menjadi lebih transparan, efisien, dan terfokus pada kebutuhan masyarakat. Penerapan akuntansi manajemen di sektor publik secara signifikan memengaruhi peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui penyediaan informasi yang relevan, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Menurut Sartika (2020) efektivitas proses pengambilan keputusan dalam instansi pemerintahan sangat bergantung pada ketersediaan indikator kinerja strategis yang dapat

digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya publik. Adanya sistem pengukuran kinerja terencana dengan baik memungkinkan pimpinan lembaga melakukan evaluasi hasil program dan menentukan arah kebijakan yang lebih tepat serta berdampak langsung pada masyarakat.

Konsep Good Governance

LAN RI memaknai *good governance* dengan pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (Solikhudin, 2022). Menurut Dwiyanto, *good governance* mengacu pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan penuh tanggung jawab, yang berjalan selaras dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep ini juga menyoroti pentingnya mencegah kesalahan dalam pendistribusian dana investasi, memberantas praktik korupsi baik di ranah politik maupun administrasi, menerapkan disiplin anggaran yang ketat, serta membangun kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis.

Sedangkan menurut Sawmar dan Mohammed, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Usman et al., 2022). Pada dasarnya *good governance* sebuah konsep yang merujuk pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam pelayanan kepada publik. Berdasarkan panduan dari *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* memiliki delapan elemen utama, yaitu partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan informasi, responsif, orientasi pada kesepakatan bersama, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sektor publik yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat. Lebih dari sekedar tujuan, *good governance* juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Untuk mencapainya, dibutuhkan sistem informasi yang terpercaya, mekanisme pengawasan internal yang efektif, dan proses pertanggungjawaban yang transparan. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran akurat, relevan, dan tepat waktu untuk membantu proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja, yang pada akhirnya memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Hubungan Akuntansi Manajemen dengan Good Governance

Hubungan antara akuntansi manajemen dan *good governance* terlihat melalui peran keduanya dalam membentuk pengelolaan organisasi yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, serta efektif. Hansen dan Mowen menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, analisis, serta penyajian informasi keuangan dan non-keuangan guna mendukung manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari proses tersebut menyediakan fondasi kuat bagi manajemen untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja organisasi secara menyeluruh.

Sementara itu, UNDP (1997) menjelaskan bahwa konsep *good governance* menekankan penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum dalam aktivitas organisasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterkaitan antara kedua konsep ini terletak pada kemampuan akuntansi manajemen untuk menyediakan informasi sebagai landasan bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aktivitas organisasi.

Secara konseptual, hubungan antara akuntansi manajemen dan *good governance* bersifat timbal balik. Akuntansi manajemen memfasilitasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang objektif, sedangkan prinsip-prinsip *good governance* memberikan panduan etis dan normatif untuk pelaksanaan akuntansi manajemen. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara adil, efisien, dan bertanggung jawab.

Pendekatan dan Modal Relevan

Dalam konteks sektor publik, akuntansi manajemen berperan penting sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pendekatan akuntansi manajemen sektor publik menekankan pada bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah. Menurut Jultri et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan akuntansi manajemen di sektor publik melibatkan elemen penting seperti penetapan tujuan kinerja yang jelas, kualitas dan kesesuaian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan informasi akuntansi dalam pembuatan anggaran dan penilaian kinerja. Dengan mengadopsi pendekatan ini, organisasi publik dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Ketika membuat keputusan, memahami modal atau biaya yang terkait sangatlah penting, yaitu menyoroti data keuangan yang memiliki dampak nyata pada keputusan yang dipertimbangkan. Biaya yang relevan adalah biaya yang akan dipengaruhi oleh pilihan yang diambil, seperti biaya tambahan, biaya yang bisa dihindari, biaya peluang, dan biaya perbedaan. Pendekatan ini mendorong manajer publik untuk menilai setiap keputusan berdasarkan perbedaan antara biaya dan manfaat pilihan yang tersedia. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek administratif tambahan, tetapi juga efektivitas dalam penggunaan dana publik. Ini sejalan dengan teori biaya relevan yang umum diterapkan dalam praktik akuntansi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang logis dan efisien berdasarkan data keuangan.

Lebih lanjut, penerapan akuntansi manajemen serta penggunaan modal yang relevan secara langsung berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola yang baik. Berdasarkan (Familia Irene et al., 2024) penerapan prinsip akuntansi manajemen yang baik akan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntansi manajemen yang akurat dan relevan membantu manajer publik untuk mengambil keputusan yang tepat waktu, berbasis data, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, metode akuntansi manajemen dalam sektor publik yang didasarkan pada penggunaan informasi biaya yang relevan berfungsi sebagai dasar yang krusial dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tata kelola yang baik. Metode ini tidak hanya fokus pada efisiensi keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran publik demi mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian ini dibangun di atas pemahaman bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Akuntansi manajemen menyajikan informasi baik finansial maupun non-finansial yang esensial untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga publik. Dengan penerapan akuntansi manajemen yang efisien, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Oleh sebab itu, sistem akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi manajemen yang tepat merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance di sektor publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan pandangan lebih mendalam mengenai peran akuntansi manajemen dalam mendukung proses pengambilan keputusan publik, dengan menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Metode ini dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian, yaitu memahami konteks, makna dan hubungan antara variabel-variabel terkait, dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih mengutamakan pengujian hipotesis.

Pendekatan ini berfokus pada deskripsi fenomena secara sistematis berdasarkan data ilmiah yang ada. Oleh karenanya, penelitian ini tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan menginterpretasikan berbagai perspektif, data empiris, dan teori yang sebelumnya tersedia. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kaitan antara akuntansi manajemen, proses pengambilan keputusan publik, dan prinsip tata kelola yang baik.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui studi literatur. Langkah-langkahnya melibatkan pencarian, pemilihan, dan evaluasi kritis dari berbagai sumber akademis yang relevan, termasuk jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta buku-buku penting tentang akuntansi manajemen dan tata kelola publik. Literatur ini diperoleh melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, perpustakaan, dan Neliti dengan kata kunci mencakup akuntansi manajemen, pengambilan keputusan, tata kelola sektor publik, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pemilihan sumber informasi menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kesesuaian dan relevansinya dengan fokus penelitian. Kriteria utama meliputi:

1. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sektor publik,
2. Keberlanjutan publikasi, dengan fokus pada karya ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2025),
3. Kredibilitas sumber, termasuk publikasi di jurnal bereputasi atau penerbit akademik yang diakui.

Secara keseluruhan, studi ini menggunakan lebih dari sepuluh jurnal ilmiah utama yang memenuhi kriteria tersebut, bersama beberapa buku referensi yang digunakan untuk memperkuat dasar teori dan memperkaya konteks analisis.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian jurnal ilmiah ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi manajemen yang baik di sektor publik sangat membantu dalam membuat keputusan lebih efektif, efisien, dan transparan. Akuntansi manajemen lebih dari sekadar pencatatan transaksi keuangan; ia berperan sebagai sumber informasi penting bagi pimpinan lembaga publik untuk merencanakan kegiatan, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil kerja organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa instansi publik yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi manajemen yang efektif berhasil menggunakan anggaran secara lebih hemat dan menunjukkan peningkatan dalam akuntabilitas publik. Selain itu, laporan keuangan yang disajikan secara terbuka dan jelas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, yang merupakan elemen penting dalam mencapai *good governance*.

Akuntansi manajemen memiliki peran strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Kedudukan Akuntansi Manajemen Sektor Publik (AMSP) sebagai Sarana Pengambilan Keputusan

Penelitian telah menunjukkan bahwa Akuntansi Manajemen Sektor Publik (AMSP) lebih dari sekadar aktivitas teknis dalam pencatatan; ini berperan sebagai informasi strategis dan menjadi fondasi bagi pengambil keputusan di badan pemerintah. Peran utama AMSP adalah mengaitkan data operasional yang kompleks dengan kebutuhan informasi manajerial yang strategis, sehingga keputusan diambil tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga berdasarkan data yang kuat (pengambilan keputusan berbasis data).

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, AMSP mendukung manajemen dalam menyusun rencana yang rasional untuk mencapai tujuan ekonomi dan menetapkan sasaran pertumbuhan yang dapat diukur. Selanjutnya, dalam peran pengawasan, AMSP menyajikan laporan hasil kerja yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, motivasi, dan evaluasi, yang memungkinkan pihak manajerial untuk mendeteksi perbedaan dan melakukan tindakan perbaikan. Data akuntansi juga berfungsi untuk membantu koordinasi upaya dari berbagai konstituen organisasi untuk mencapai tujuan.

Akuntansi Manajemen Sektor Publik memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organ pemerintahan. Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi manajemen yang dirancang secara matang, setiap unit kerja dapat mengevaluasi sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal dan berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis lembaga. AMSP mendukung prinsip *value for money* dengan memastikan hasil maksimal tercapai melalui pengelolaan biaya yang efisien. AMSP juga bertindak sebagai alat analisis kebijakan, yang sangat penting dalam evaluasi program dan aktivitas publik. Dengan menyajikan informasi mengenai biaya, manfaat, serta potensi risiko dari berbagai alternatif kebijakan, AMSP membantu pengambil keputusan dalam menilai kelayakan dan dampak kebijakan secara objektif dan terukur. Oleh karena itu, AMSP bukan hanya berfungsi secara administratif tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sektor publik. Secara konseptual, AMSP menegaskan bahwa akuntansi tidak lagi sekadar aktivitas pencatatan keuangan, melainkan instrumen strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan yang berfokus pada keterpaduan aspek keuangan dan manajerial demi tercapainya *good governance*.

2. Akuntansi Manajemen dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Akuntansi Manajemen Sektor Publik memegang peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta fokus pada pelayanan publik. Disiplin ini menghadirkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membantu proses pengambilan keputusan di kalangan pemerintah. Informasi tersebut menjadi landasan pembuatan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, transparansi yang terwujud berkat akuntansi manajemen memperluas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Selain mendorong keterbukaan, akuntansi manajemen juga memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Tanggung jawab vertikal diarahkan kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kementerian atau lembaga pusat, sementara tanggung jawab horizontal disampaikan kepada masyarakat luas sebagai penerima kebijakan. Akuntabilitas horizontal lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik penyelewengan, karena masyarakat ditempatkan sebagai pengawas utama. Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan, tetapi juga berperan sebagai alat informasi bagi pemerintah dan publik yang memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang jelas dan dapat diverifikasi, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Proses ini menumbuhkan rasa kepercayaan dan keterlibatan publik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, penelitian oleh Amelia & Hidajat (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui praktik akuntansi manajemen dapat meningkatkan efektivitas kinerja lembaga publik. Kejelasan informasi keuangan membantu pengelola anggaran untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di samping itu, akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya organisasi yang jujur dan bertanggung jawab. Akuntabilitas tak sebatas pelaporan saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan yang disusun dengan transparansi adalah bukti bahwa pemerintah menghormati hak publik untuk mengetahui dan menilai seberapa efektif dana negara digunakan. Secara keseluruhan, akuntansi manajemen di sektor publik bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian signifikan dari usaha membangun kepercayaan publik, memperkuat kontrol sosial, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Implementasi akuntansi manajemen yang berfokus pada keterbukaan dan akuntabilitas akan memperkuat dasar dari pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas.

3. Akuntansi Manajemen sebagai Alat Pengendalian dan Evaluasi

Akuntansi manajemen di sektor publik berperan sebagai alat pengendalian internal yang membantu manajer publik dalam memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan anggaran, analisis biaya, serta pelaporan keuangan periodik, pimpinan dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas program. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini memungkinkan organisasi publik mengidentifikasi pemborosan sumber daya dan melakukan perbaikan kebijakan secara tepat waktu.

Penerapan sistem pengendalian manajemen yang berbasis akuntansi juga mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral kepada masyarakat (Supratininingrum & Lukas, 2021). Dalam konteks sektor publik, Khasanah, Sabaruddin, et al., (2024) menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen. Ketika lingkungan organisasi menghadapi ketidakpastian, keberadaan informasi yang akurat dan relevan menjadi kunci bagi manajemen untuk mengambil keputusan berbasis bukti.

Dari sisi evaluasi, akuntansi manajemen memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan program baik dalam aspek keuangan maupun operasional. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi organisasi publik untuk menilai efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian dan evaluasi berperan

penting dalam memperkuat fungsi manajerial, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta menjamin akuntabilitas lembaga publik.

Menurut Purnama & Fuadah (2025) penerapan akuntansi manajemen yang baik membantu organisasi dalam menciptakan proses evaluasi yang lebih objektif karena keputusan didasarkan pada data yang nyata dan terukur. Secara keseluruhan, akuntansi manajemen berperan sebagai alat yang membantu organisasi dalam mengontrol kegiatan, menilai hasil kerja, dan memperbaiki pelaksanaan program agar lebih efektif. Dengan pengelolaan yang baik, akuntansi manajemen dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, akuntansi manajemen juga membentuk siklus umpan balik yang berkelanjutan dalam pengelolaan organisasi. Informasi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, melainkan juga sebagai fondasi bagi perbaikan strategi dan perencanaan masa depan. Dari sudut pandang strategis, akuntansi manajemen memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan penilaian kinerja yang menyeluruh. Analisis data keuangan dan non keuangan memungkinkan pimpinan untuk mengevaluasi pencapaian target serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi yang didasarkan pada informasi akurat menjadikan akuntansi manajemen sebagai instrumen pengambilan keputusan yang objektif dan dapat diandalkan.

Proses evaluasi yang menggunakan data dari akuntansi manajemen memungkinkan organisasi untuk menilai tingkat kesesuaian hasil kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab manajerial, tetapi juga menjadi landasan bagi formulasi kebijakan baru yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya memiliki peran administratif, melainkan juga nilai strategis dalam memperkuat fungsi pengendalian, meningkatkan kualitas kinerja, serta mendukung pembentukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

4. Akuntansi Manajemen dan Penerapan *Good Governance*

Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di sektor publik. Dengan menyediakan informasi keuangan yang tepat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntansi manajemen membantu lembaga pemerintah dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan integritas bisa diterapkan lebih efektif apabila laporan dan pengambilan keputusan didasarkan pada data yang terukur dan terverifikasi.

Pelaksanaan tata kelola yang baik menuntut agar organisasi publik tidak hanya melaporkan hasil kegiatan, tetapi juga menyediakan informasi yang memadai untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan, metode pengukuran, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen berperan sebagai alat yang mengaitkan aktivitas operasional dengan tujuan organisasi melalui pembuatan laporan keuangan dan laporan kinerja yang terbuka.

Menurut Hida & Berliani (2024) penerapan akuntansi manajemen yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat oleh Santoso et al., (2024) yang menyatakan memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa praktik akuntansi publik yang transparan dan penerapan *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Implementasi akuntansi manajemen yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik juga turut membangun budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, dengan setiap aktivitas dan penggunaan anggaran dapat dipantau dan dievaluasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah tetapi juga memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan tata kelola yang bersih, jujur, dan profesional.

Akuntansi manajemen juga memperkuat sistem pengendalian internal dengan menyoroti pentingnya proses evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan mekanisme ini, institusi publik dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program benar-benar sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara akuntansi manajemen dan penerapan *good governance* menjadi fondasi utama dalam membentuk pemerintahan yang transparan, efisien, dan berfokus pada pelayanan publik berkualitas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara akuntansi manajemen dan tata kelola yang baik tidak hanya memperkuat pelaporan dan pengawasan tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penerapan konsisten dari kedua aspek ini

akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

5. Dampak Akuntansi Manajemen terhadap *Good Governance*

Akuntansi manajemen dalam sektor publik memiliki peran fundamental dalam memperkuat penerapan prinsip *good governance*. Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, dibutuhkan sistem informasi keuangan yang mampu menghasilkan data yang relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Akuntansi manajemen menjadi instrumen utama dalam menyediakan informasi tersebut karena berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan, bukan sekadar pelaporan historis sebagaimana akuntansi keuangan.

Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai sistem informasi yang membantu manajer publik dalam menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi (Demung et al., 2025). Melalui data yang dihasilkan, pengambil keputusan dapat menilai efektivitas kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta menetapkan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, akuntansi manajemen berkontribusi dalam membangun proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidencebased decision making*), yang merupakan salah satu karakteristik utama dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Praktik akuntansi manajemen menjadi instrumen penting dalam memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan menyediakan data internal yang terperinci (biaya, varians, alokasi sumber daya), akuntansi manajemen mendukung pembuat kebijakan agar dapat melaporkan kegiatan publik secara lebih terbuka dan kredibel. Misalnya, Salmanzadeh et al., (2022) menyatakan bahwa *management accounting* membantu mengidentifikasi aliran sumber daya, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan akhirnya mengarah pada pengalokasian sumber daya secara optimal, mencegah korupsi, serta meningkatkan legitimasi, transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, dalam sektor publik, akuntansi manajemen berperan sebagai bagian dari sistem kontrol manajemen (*management control system*) yang memperkuat *good governance* melalui perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Sistem kontrol manajemen yang optimal memerlukan peran aktif akuntansi manajemen agar organisasi publik mencapai efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengawasan terhadap penyimpangan.

Dampak lain yang makin krusial adalah dukungan terhadap integrasi tujuan keberlanjutan (*sustainability*) ke dalam tata kelola publik. Konsep *Sustainable Management Accounting (SMA)* memungkinkan akuntansi manajemen memperluas jangkauannya, termasuk pengukuran biaya lingkungan dan sosial, sehingga pelayanan publik tidak hanya menekankan aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, penelitian Johri et al., (2024) menunjukkan bahwa praktik SMA mendorong transparansi yang lebih tinggi dan pengelolaan tata kelola korporasi yang lebih berkelanjutan yang relevan ketika diterapkan dalam konteks pemerintahan. Dengan demikian, melalui kombinasi peningkatan transparansi, penguatan kontrol internal, dan pengintegrasian aspek keberlanjutan, akuntansi manajemen berpotensi membawa kontribusi nyata terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam sektor publik.

SIMPULAN

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen memainkan peran kunci dalam pengelolaan keuangan sektor publik agar lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta efisien. Dengan menerapkan sistem akuntansi manajemen yang terorganisir dengan baik, lembaga pemerintah dapat memperbaiki fungsi perencanaan, pengawasan anggaran, dan penilaian kinerja organisasional. Temuan ini juga memperkuat bahwa akuntansi manajemen adalah elemen utama dalam pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu untuk memahami cara akuntansi manajemen mendukung penerapan tata kelola yang baik. Sistem ini terbukti berperan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang jujur dan dapat dipercaya.
3. Dari segi teori, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi manajemen tidak hanya berperan dalam pencatatan transaksi, namun juga sebagai sumber informasi penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Sementara itu, dalam praktiknya, temuan ini menyoroti pentingnya

meningkatkan kapasitas aparaturnya untuk menerapkan akuntansi manajemen berbasis kinerja, demi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan sangat berintegritas.

4. Keterbatasan penelitian ini mencakup metode yang digunakan, yaitu studi literatur tanpa data lapangan secara langsung. Ruang lingkupnya juga terbatas pada pembahasan konseptual, sehingga belum bisa menggambarkan secara menyeluruh penerapan akuntansi manajemen pada berbagai lembaga pemerintah.
5. Disarankan agar peneliti berikut dapat melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus lapangan untuk memberikan bukti empiris mengenai penerapan akuntansi manajemen di sektor publik. Selain itu, pengembangan sistem akuntansi manajemen berbasis teknologi digital bisa menjadi fokus penelitian selanjutnya agar dapat memenuhi kebutuhan tata kelola pemerintahan modern yang semakin berubah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kemurahan-Nya yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan penelitian berjudul “Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Dalam Pengambilan Keputusan Menuju *Good Governance*” ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Aryanto Nur, SE, MM, sebagai pembimbing akademik, atas semua bimbingan, petunjuk, dan masukan berharganya selama penyusunan penelitian ini. Dukungan dan arahnya sangat membantu saya dalam memahami metode kajian literatur dan menyusun analisis secara sistematis.

Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis, peneliti, dan penerbit jurnal ilmiah yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Lewat penelitian mereka yang telah dipublikasikan, saya mendapatkan data sekunder, teori, dan hasil empiris yang sangat berharga untuk memperkaya studi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungan fasilitas akademik selama penyusunan penelitian. Tak lupa, saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa serta keluarga yang terus memberikan dukungan moral, semangat, dan doa sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Saya menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, terutama dalam bidang akuntansi manajemen dan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562–573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [2] Baihaqqy, M. R. I. (2023a). *Akuntansi Manajemen* (Vol. 1). Penerbit Amerta Media. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/44d57d01-66e2-4036-ae2a-bc5fa947f1ee> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025)
- [3] Baihaqqy, M. R. I. (2023b). *Pengambilan Keputusan Manajerial (Desicion Making)*. Penerbit Amerta Media. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/4ad55327-f1d8-4f85-83b9-76ef107e7102> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025)
- [4] Demung, I. W Sepriano., Judujanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Teori Dan Praktik* (& N. G. Permata, Eds.; Vol. 1). PT Sonpedia Publishing Indonesia. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [5] Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Saurmauli Pangaribuan, W. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. *Keuangan Dan Auditing*, 5(1), 179–195. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [6] Hilda, R. H. S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Maneksi*, 13(2), 265–273. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)

- [7] Inka Putri, B., Astuti, A., Yudha Afianta, A., & Negeri Malang, U. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics*, 05(02), 106–115. (Diakses pada tanggal 30 September 2025)
- [8] Johri, A., Singh, R. K., Alhumoudi, H., & Alakkas, A. (2024). Examining the Influence of Sustainable Management Accounting on Sustainable Corporate Governance: Empirical Evidence. *Sustainability*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/su16219605> (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025)
- [9] Jultri, A., Made, A., & Wirshandono Y, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–13. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [10] Khasanah, D. U. I., Sabaruddin, & Asmanah, S. (2024). Efektifitas Sistem Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Dan Tidak Pastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderasi. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(2), 155–184. <http://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/utility> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [11] Muna, I., & Lautania, M. F. (2022). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Keadilan Prosedural Dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 369–378. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21101> (Diakses pada tanggal 29 September 2025)
- [12] Purnama, Z. A., & Fuadah, L. L. (2025). Management Accounting Practices in the Public Sector: A Systematic Literature Review on Positive Outcomes and Negative Outcomes. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 1(3), 01–13. <https://doi.org/10.56858/jmpkn.v1i3.563> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [13] Salmanzadeh, H., Kordestani, G., & Kazemi, H. (2022). The Role of Management Accounting in Improving Management Control System in Public Sector. *Iranian Journal of Finance*, 6(1), 54–82. <https://doi.org/10.30699/ijf.2021.279013.1211> (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025)
- [14] Santoso, R., Sulisnaningrum, E., Stie, J., Negara, T., & Malang, I. (2024). Implementation of Good Governance in Public Sector Accounting: Evaluation of Effectiveness in Local Government. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1). <https://doi.org/10.54204/TAJI/Vol152024011> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [15] Sartika, D. (2020). Penggunaan Informasi Kinerja Strategik Dalam Pengambilan Keputusan Implementasi Dan Penilaian Strategi Pada Organisasi Sektor Publik. *Penggunaan Informasi Kinerja*, 45–54. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)
- [16] Sianipar N, Simanullang O, Galingging L, Sihotang N, & Saragi DR. (2025). Peran Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan dan Peningkatan Kinerja Perusahaan di Era Digital Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 366–371. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.6011> (Diakses pada tanggal 30 September 2025)
- [17] Solikhudin, M. (2022). Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Pendekatan Maqasid al-Shari’ah) (M. F. Faiz, Ed.; Vol. 1). CV Bintang Semesta Media. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025)
- [18] Suprantiningrum, S., & Lukas, A. D. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan Variabel Moderating Teknologi Informasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 174–185. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.368> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)
- [19] Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 11–24. <https://doi.org/10.37531/amar.v2i2.318> (Diakses pada tanggal 29 September 2025)

- [20] Yosep, M., & Indriasih, D. (2020). Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Pada Entitas Sektor Publik (M. Yosep & D. Indriasih, Eds.). Scorpindo Media Pustaka. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025)